**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan.[[1]](#footnote-2)

Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Masalah ini lebih memfokuskan pada paparan tawaran berbagai strategi pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan dan sumberdaya yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan diikuti dengan meningkatkan layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu bagi masyarakat miskin. Membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartsipasi dalam mengambil keputusan. Diharapakan dengan semakin besarnya kewenangan, pemerintah daerah akan mempercepat usaha penanggulangan angka kemiskinan. Oleh Karena itu, usaha penanggulangan kemiskinan haruslah memiliki perencanaan, penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganan yang didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin.[[2]](#footnote-3)

Disisi lain, penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Otonomi harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public participation*) pemerataan dan keadilan serta memperhatikan kondisi, potensi dan keanekaragaman daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dan memajukan suatu daerah, pembangunan tidak hanya menjadi beban dan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab pihak swasta dan masyarakat.

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Hingga saat ni belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna. Tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus dikembangkan. Program K2I (kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur) yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Riau merupakan terobosan baru cikal bakal pembangunan di Riau. Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan menindaklanjuti keputusan presiden nomor 124 tahun 2001 tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah Provnsi Riau mengeluarkan keputusan Gubernur Riau nomor 591/IX/2004 tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau.[[3]](#footnote-4)

Berdasarkan keputusan tersebut pemerintah Provinsi Riau membuat suatu program penanggulangan kemiskinan yang disebut program pemberdayaan desa (PPD) dan ditetapkan dalam peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2006 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis program pemberdayaan desa provinsi Riau, seluruh proses kegiatan PPD pada hakikatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:[[4]](#footnote-5)

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan.

Program pemberdayaan desa (PPD) dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota yaitu melaksanakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan Mikro (LKM). Program ini merupakan Bentuk pemberdayaaan dibidang ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang tertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.[[5]](#footnote-6)

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD) dan berfungsi sebagai lembaga keuangan Desa untuk menyalurkan bantuan dana usaha melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana usaha desa. Bantuan dana yang diluncurkan oleh Pemerintah kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam sebesar Rp.500.000.000 pada saat sekarang ini dan sudah tersalurkan semuanya. Jumlah dana yang diterima masing-masing anggota UED-SP sesuai dengan ketentuan dan kelayakan agunan. Artinya agunan menentukan jumlah dana yang akan dipinjam. Besar dana yang sudah dipinjamkan kepada anggota dengan jasa pinjaman/bunga 1,5% .[[6]](#footnote-7)

Bentuk nyata program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini adalah untuk memihak dan melayani masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari kantor UED-SP. Anggota UED-SP dalam meminjam dana harus membawa agunan yang merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga UED-SP. Namun orang yang dapat memanfaatkan dana tersebut adalah orang yang memiliki jaminan harta benda untuk dijadikan jaminan.

Salah satu bentuk program pemberdayaan desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah UED-SP. UED-SP adalah singkatan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yaitu lembaga pedesaan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif desa. Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya, antara lain :[[7]](#footnote-8)

1. Perdagangan terdiri dari kios dan warung
2. Pertanian terdiri dari tanaman pangan
3. Perkebunan terdiri dari kelapa sawit, karet, dan kelapa
4. Perternakan terdiri dari itik, ayam, sapi, kerbau, dan kambing
5. Perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan tambak
6. Jasa berupa usaha perbengkelan, salon, servis computer, dan HP
7. Industri rumah tangga terdiri dari pembuatan minyak kelapa, gula aren, genteng, batu bata, pengolahan ikan, gerabah, dan anyaman.

UED-SP berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut.[[8]](#footnote-9) Usaha ekonomi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam akan diberikan kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha, sebagian besar dana yang disalurkan melihat kondisi masyarakat desanya. Persyaratan dan kriteria masyarkat yang boleh meminjam tentunya yang sudah mempunyai usaha dan memenuhi syarat administrasi yang sudah ditetapkan. Jumlah maksimal peminjaman maksimal Rp. 20.000.000 dan minimal Rp. 1.000.000 untuk usaha produktif dan bukan untuk konsumtif masyarakat desa. Setelah 3 tahun didampingi fasilitator dari Kabupaten, maka UED-SP berkembang menjadi Bumdes, maka hasil laporan hanya disampaikan kepada pihak Kabupaten, tidak sampai ke tingkat Provinsi.[[9]](#footnote-10)

AdapunUsaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam **(**UED-SP) yang diteliti adalah Desa Selensen Kecamatan Kemuning dan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Pemilihan dua desa ini sebagai objek penelitian didasarkan pada alasan. *Pertama*, Desa Selensen dan Desa Pekan Tua merupakan desa produktif yang ada di kabupaten Indragiri Hilir. *Kedua* dari sisi wilayah, kedua desa berada pada tempat strategis. *Ketiga,* keduadesa ini dijadikan percontohan desa mandiri dalam bidang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang telah mendapat sertifikat terbaik I dan II.

Realitas dan asumsi-asumsi sebagaimana tersebut di atas menjadi motivasi penulis untuk melakukan pelacakan dan penelitian terhadap program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan ekonomi Islam. Penelitian yang dibingkai dalam format tesis ini penulis rangkum dalam kalimat judul “***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Indragiri Hilir menurut Ekonomi Islam”.***

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah penelitian dalam tesis ini sebagai berikut : bagaimana program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Indragiri Hilir menurut ekonomi Islam ?

Untuk membantu agar penelitian ini lebih fokus dan mengerucut, maka penulis membatasi masalah penelitiannya pada dua desa, yaitu program pemberdayaan masyarakat Desa Selensen Kecamatan Kemuning dan program pemberdayaan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

1. **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai rumusan dan batasan masalah di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Indragiri Hilir menurut Ekonomi Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk memberikan penjelasan secara komprehensif tentang program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Indragiri Hilir menurut Ekonomi Islam
2. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap khazanah intelektual keislaman
3. Acuan bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan pengelola program pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai ekonomi islam untuk meningkatkan ekonomi umat
4. **Penelitian terdahulu yang relevan**

Seiring dengan pesatnya kajian ekonomi syariah dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya, hal ini mendorong terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang fokus untuk mempelajari masalah-masalah pemberdayaan desa yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Potensi ekonomi masyarkat desa harus dikembangkan untuk mengembangkan ekonomi dikalangan masyarakat bawah, selama pengembangan ekonomi desa kurang berhasil disebabkan masih kurangnya pembinaan terhadap masyarakat desa berbasis ekonomi Islam.

Pada dasarnya, program pemberdayaan desa adalah program bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan kepada masyarakat dan memberikan bantuan dalam bentuk stimulan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat yang sifatnya bergulir

Terdapat kesenjangan dalam distribusi pendapatan sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin terlalu jauh. Islam memberikan solusi yang terindah dalam segala aspeknya, prinsip ekonomi syariah yang memiliki beberapa model baik dari sistem lembaga keuangan perbankan maupun instrument kebijakannya yang lebih mudah menggerakan perekonomian masyarakat desa karena usaha kecil dan menengah mampu di akses dengan sistem yang ditawarkan ekonomi syariah. Oleh karena itu apapun di permukaan bumi ini pijakannya adalah Islam maka ekonomi Islam adalah konsep yang terbaik untuk menciptakan perkembangan ekonomi di negara ini.

Program pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia khususnya di daerah Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Indragiri Hilir menurut Ekonomi Islam* yang dimaksud adalah studi tentang bagaimana program pemberdayaan masyarakat desa melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dilihat dari kaca mata ekonomi Islam.

Asumsi – asumsi yang diuraikan di atas tidak cukup untuk dijadikan acuan dalam kerangka teori, maka dibutuhkan penelitian-penelitian terdahulu. Di antara penelitian terdahulu yang mendukung adalah penelitian tentang :

* + 1. Penelitian yang dilakukan Tarmi mahasiswa Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi 2010, dengan judul *Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEK-SP) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sera Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.* Dengan hasil penelitian Penyaluran dana bantuan UED-SP kepada Masyarakat tidak tepat sasaran, hal ini terjadi karena proses verifkasi dan penetapan anggota UED tidak sesuai dengan ketentuan Program UED-SP. Dalam pelaksanaan Program UED-SP terdapat anggota yang berhasil dan anggota yang gagal. Anggota yang berhasil pertama anggota UED-SP menggunakan dana untuk usaha dan disiplin dalam pembayarannya. Kedua anggota menggunakam dana untuk konsumtif dan tepat waktu dalam pembayarannya dikarenakan anggota UED-SP memiliki keadaan ekonomi yang baik. Anggota UED-SP yang gagal karena kemunduran dalam usahanya dan anggota UED-SP memiliki etika yang tidak baik sehingga anggota UED-SP mengalami penunggakan. Pengawasan terhadap pelaksanaan UED-SP tidak berjalan dengan efektif sehingga pengelola tidak mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh anggota UED-SP dan adanya penyalahgunaan dana. Selain itu sanksi terhadap pelaksanaan UED-SP tidak tegas menyebabkan program tidak berjalan dengan baik dan sukses.
    2. Yusni Syamsidar Dan Ernawaty *”Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam (UED/K-SP) di Desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak”*, FISIP Universitas Riau, dalam artikel ini menjelaskan tentang Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam (UED/K-SP) di Desa Gabung Makmur Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak dikategorikan belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan usaha ekonomi desa/kelurahan simpan-pinjam menggunakan indikator-indikator *planning, organizing, actuating, dan controlling* yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan UED/K-SP. Hal ini yang menyebabkan dalam pegelolaan UED/K-SP tidak berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED-SP) adalah: Sumber Daya Manusia (SDM), Karakter pemanfaat UED/K-SP, Sumberdaya Finansial.
    3. Ahmad Fahri Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul *“Efektivitas Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) Delima dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Limau Manis Kec. Kampar Kab. Kampar .* Penelitian ini dilakukan di kantor UED-SP Delima Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas Program Pembangunan Desa (PPD) usaha ekonomi desa simpan-pinjam (UED-SP) dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Program

Pembangunan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari permasalahan yang diangkatkan, di samping membahas tentang pemberdayaan desa melalui pengelolaan UED-SP, Penulis juga membahas konsep ekonomi Islam pada program pemberdayaan desa. Pembahasan tersebut tidak dibahas pada penelitian sebelumnya, yakni membahas masalah program pemberdayaan desa menurut ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam yang menjadi analisis dalam program pemberdayaan desa dari sisi pengelolaan dan pelaksanaan. Akhir dari penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan Program Pemberdayaan Desa melalui UED-SP ditinjau dari sisi Ekonomi Islam.

1. **Defenisi Operasional**

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda dari istilah atau variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan-batasan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah Program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, penyediaan dana usaha desa dan penguatan koordinasi serta sinergi sektoral dalam pembangunan desa secara partisipatif.[[10]](#footnote-11)
2. Indragiri Hilir adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau
3. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al Quran dan sunnah.[[11]](#footnote-12)
4. **Metode Penelitian**
5. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan temanya penelitian ini yaitu program pemberdayaan desa di Kabupaten Indragiri Hilir menurut ekonomi Islam di Desa Selensen Kecamatan Kemuning dan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

1. Sumber data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu: data primer dan data sekunder

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama. Data ini berkaitan langsung dengan informan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pengelola Unit Usaha Program Pemberdayaan Desa di Desa Selensen Kecamatan Kemuning dan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Riau.

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber data dan literatur yang dapat mendukung serta memenuhi informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan diantaranya artikel, buku, data laporan kegiatan atau keuangan yang diperoleh dari unit usaha yang ada di Desa Selensen Kecamatan Kemuning dan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Riau dan sumber lain yang dapat mendukung data dalam penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai pendekatan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak kepala unit usaha desa seputar apa dan bagaimana pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat desa, wawancara selanjutnya dilakukan dengan kepala dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD), wawancara ini dilakukan dengan tujuan mengetahui perkembangan program Pemberdayaan masyarakat desa.

.

1. Dokumentasi

Yaitu mengadakan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan, berupa dokumen-dokumen yang mendukung terhadap data penelitian yang berkaitan dengan program Pemberdayaan desa yang ada di Desa Selensen Kecamatan Kemuning dan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Riau. Dokumentasi ini penulis peroleh dari buku-buku tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, program Pemberdayaan desa dan ekonomi Islam, laporan kegiatan kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan realisasi program Pemberdayaan desa yang ada di Desa Selensen Kecamatan Kemuning dan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Ingra giri Hilir Tembilahan Riau.

1. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat, sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analitik adalah cara untuk menguraikan dan menganalisa data dengan cermat, tepat dan terarah.[[12]](#footnote-13) Metode ini dipakai untuk menganalisa data yang berasal dari pengelola program pemberdayaan desa.

Secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian ini memakai analisis integral. Semua data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder diuji melalui pencermatan dan analisa yang mendalam, kritis dan seobjektif mungkin.

Teknik penulisan mengacu kepada Buku Panduan Program pasca sarjana IAIN Imam Bonjol Padang. Sedangkan penggunaan istilah berdasarkan sistem umum EYD dan pembentukan istilah yang disusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pemakaian istilah asing dan penggunaan transliterasi, penulis juga menggunakan pedoman yang telah ditetapkan oleh program Pasacasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

1. Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan, (*Yogyakarta : Aditya Media, 2003), h. 20 [↑](#footnote-ref-2)
2. Totok Mardikanto, *Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat,* (Bandung : Alfabeta, 2004), h. 31 [↑](#footnote-ref-3)
3. Pemprov.Riau, *Pedomam Umum Program Pemberdayaan Desa,* (Pekanbaru: PPM Riau, 2005). h. 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid,* h. 2 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*., h. 3 [↑](#footnote-ref-6)
6. Syofyan Nur, S.Sos, MP, Kabid PUEM, *Wawancara 18 Nov 2013*  [↑](#footnote-ref-7)
7. Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, *Buku Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan UED-SP Prgram Pemberdayaan Desa,* (Pekan Baru : 2009),h. 2 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid,* h. 3 [↑](#footnote-ref-9)
9. Rudi Supriadi, pengelola BUMDes Pekan Tua, Wawancara 18 November 2013 [↑](#footnote-ref-10)
10. BPMPD Kab.Indragiri Hilir, *Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD),* 2013, h. 1 [↑](#footnote-ref-11)
11. P3EI UII, *Ekonomi Islam,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 19 [↑](#footnote-ref-12)
12. M.Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 63 [↑](#footnote-ref-13)